

## SUARA DAN KIPRAH PEREMPUAN DALAM POLITIK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rahmat Gunawijaya

IAIN Pontianak

Email: [rahmatraystar@gmail.com](mailto:rahmatraystar@gmail.com)

Naskah diterima tanggal: 10 Januari 2019

Selesai tanggal: 14 April 2019

### ABSTRACT

*This study tries to describe how the women who were elected in the position of Regional Head in West Kalimantan Province. The research method used is a combination of quantitative and qualitative with a purposive sampling descriptive approach. Based on the results of the vote in the election of the Regent / Deputy Regent and Deputy Mayor / Deputy Mayor who won the selected female candidates in Sambas Regency, Landak Regency and Singkawang City, the number of male voters was greater than that of female voters. This means that women who have a minority voting base in the elections of Regional Heads can win the constellation of direct elections by gaining support from the majority vote of male voters thanks to an open direct election system in which the most votes will be the winner of regional elections.*

[Penelitian ini mencoba mendeskripsikan bagaimana kiprah perempuan yang terpilih dalam jabatan Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif *purposive sampling*. Berdasarkan hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Wakil Walikota/Wakil Walikota yang berhasil dimenangkan calon perempuan yang terpilih di Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kota Singkawang diketahui jumlah pemilih laki-lakinya lebih besar dari pada pemilih perempuan. Artinya perempuan yang memiliki basis suara minoritas dalam pemilihan Kepala Daerah bisa memenangkan konstentasi pemilihan langsung dengan mendapat dukungan dari suara mayoritas pemilih laki-laki berkat sistem pemilihan langsung terbuka di mana suara terbanyak akan menjadi pemenang pemilihan kepala daerah].

**Kata Kunci:** Pemilihan Kepala Daerah, Politik, Bupati/Walikota, Suara Perempuan

### PENDAHULUAN

Suara perempuan di panggung politik nasional mulai terdengar di media pers pada era reformasi 1999 dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil menjadi pemenang pemilu legislatif dengan perolehan suara 33,12 % suara

atau 153 kursi DPR dari total 48 partai politik yang mengikuti pemilihan umum 1999. Pada tahun 2001, hasil keputusan politik melalui voting pemilihan presiden dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengantarkan Megawati Soekarnoputri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia pada periode pemerintahan tahun 2001 - 2004 menggantikan KH. Abdurahman Wahid yang dilengserkan DPR, sampai akhirnya kalah suara dengan Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan umum presiden langsung pertama di Indonesia pada tahun 2004.

Di Provinsi Kalimantan Barat dalam sejarah tercatat pernah memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipimpin oleh perempuan baik di tingkat pemerintahan kota dan kabupaten sebagaimana data berikut :

**Tabel I**  
**Kepala Daerah Perempuan Di Kabupaten/ Kota**  
**Di Provinsi Kalimantan Barat**

NO	NAMA	JABATAN	MASA JABATAN
1	Rohana Muthalib	Walikota Pontianak	1950-1953
2	dr. Hj. Djulianti	Bupati Sambas	2011-2016
	Djuhardi Alwi, M.Ph		
3	Tjai Chui Me, SE	Walikota Singkawang	2017-2022
4	dr. Karolin Margreth Natasha	Bupati Landak	2017 -2022
5	Dra. Mahmudah	Pj. Walikota Pontianak	14 Feb s/d 24 Juni 2018
6	dr. Hj. Djulianti	Wakil Bupati Sambas	2006 - 2011
	Djuhardi Alwi, M.Ph		
7	Hairiah, SH, MH	Wakil Bupati Sambas	2016 -2021

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan catatan sejarah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sampai tahun 2019 pernah dipimpin oleh dua walikota perempuan, satu Pj walikota perempuan dan satu bupati perempuan, bahkan kota Pontianak bisa jadi kota di Indonesia pertama yang dipimpin oleh seorang walikota perempuan yakni Rohana Muthalib yang memimpin Pemerintahan Kota Pontianak pada tahun 1950 -1953 setelah diangkat oleh Pemerintah Kerajaan Pontianak berdasarkan Keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak bertanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1946.<sup>1</sup>

1. Dalam Keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak disebut Peraturan Pemerintah Pontianak dan membentuk Pemerintah kota Pontianak. Sedangkan perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak. Walikota pertama ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Pontianak adalah Ny. Rohana Muthalib.

Literatur tentang Walikota perempuan pertama di Kota Pontianak ini memang sangat minim, karena sedikitnya media surat kabar di Kalimantan Barat pada tahun 1950 yang membahas suara dan kiprahnya, tapi yang jelas sebagai penghargaan atas dedikasinya terhadap Kota Pontianak, nama Rohana Muthalib diabadikan menjadi ruangan aula di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Pontianak sampai sekarang<sup>2</sup>. Hal ini tentu berbeda dengan Walikota perempuan pertama dari Kota Singkawang yang terpilih pada pemilihan Walikota Singkawang tahun 2017, yakni Tjai Chui Me yang suara dan kiprahnya dapat kita telusuri banyak media daerah maupun nasional. Sedangkan untuk tingkat kepala daerah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat terdapat dua Bupati perempuan yakni dr. H. Djulianti Djuhardi Alwi, M.Ph di Kabupaten Sambas dan dr. Karolin Margreth Natasha di Kabupaten Landak.

Munculnya Kepala Daerah perempuan di Indonesia tidak terlepas dari perubahan iklim politik dimana sebelum tahun 2005 di Indonesia, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih tidak langsung melalui perwakilan rakyat yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.

Pemilihan kepala daerah secara langsung diartikan sebagai pemilihan oleh rakyat secara langsung. Mayoritas suara terbanyak menjadi acuan pemenang pada pilkada tersebut serta pemilihan oleh rakyat secara langsung serentak diadakan seluruh daerah.<sup>3</sup> Pemilihan langsung memiliki korelasi erat dengan kedaulatan rakyat. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin didaerahnya sehingga terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan rakyat yang dapat mendorong penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis dan partisipatif.<sup>4</sup>

Peluang perempuan untuk menduduki kepala daerah dengan adanya pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih rakyat menjadi cukup terbuka

---

<sup>2</sup>Gunawijaya, *Geliat Pembangunan Ekonomi Kota Pontianak*. (Pontianak:IAIN Press,2017), hlm.. 40

<sup>3</sup>Budiman,*Pilkada Tidak Langsung Dan Demokrasi Palsu*, (Yogyakarta :Pustaka Yustisia,2015), hlm.. 161.

<sup>4</sup>Nowyandri,*Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*. (Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 No. 2,2015).

lebar, karena yang menjadi penentu suaranya adalah rakyat. Menurut Fadullah (2011:102) “ Negara kuat karena rakyatnya berdaulat. Kedaulatan rakyat bagi bangsa Indonesia adalah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat atau atas nama rakyat dengan dasar musyawarah” .Dalam hal ini, musyawarah berarti curah gagasan, baik lisan maupun tulisan dalam merumuskan dan menetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk melindungi rakyat.<sup>5</sup>

Sebagai hasil kedaulatan rakyat, tokoh perempuan yang berhasil meraih suara terbanyak dan dinyatakan sebagai pemenang pilkada dan dilantik menjadi Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota lewat konstitusi yang syah tentu akan mengemban amanat rakyat dan wajib melakukan sumpah jabatan dengan menyebut nama Allah.<sup>6</sup>

Dalam tradisi Jawa, kepala negara ideal disimbolkan dengan nama “ Ratu Adil”, mengapa Ratu bukan Raja ? Sama halnya dengan penyebutan ibu kota bukan bapak kota ? Indonesia menyebut tanah air dengan ibu pertiwi. Istilah ini tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin tapi dengan sifat kasih sayang dalam penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada rakyat. Ratu adil adalah pemimpin yang mendahulukan mufakat dalam pengambilan keputusan namun tegas dalam penegakan hukum, melayani dan mencukupi kebutuhan dasar rakyat, pangan, sandang pangan, pendidikan, kesehatan dan kebebasan berekspresi.<sup>7</sup>

Daya dan potensi dalam diri perempuan untuk berkembang lagi pada masa kini sebagai konsekuensi dari peningkatan ilmu, aktivitas serta kepedulian perempuan dalam beramal dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar. Pada gilirannya hal itu memberi peluang untuk meraih kedudukan dan jabatan tinggi dimasyarakat.<sup>8</sup>

Dalam tulisan ini penulis mencoba mendeskripsikan bagaimana perolehan suara dan kiprah perempuan yang terpilih dalam jabatan Kepala Daerah di Provinsi

---

<sup>5</sup>M. *Quraish Shihab, Wawasan Al Quran* .(Bandung :Mizan,1996) hlm.. 469

<sup>6</sup>“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur/Bupati/Walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

<sup>7</sup>Fadullah, *Kontribusi Islam Membentuk Watak dan Kepribadian Bangsa Indonesia*.(Jakarta.Diadit Media Press,2013), hlm.. 146

<sup>8</sup>Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* .(Jakarta: Kibar Press, 2007), hlm. 114

Kalimantan Barat khususnya dalam mengemban amanat rakyat yang memilihnya. Dalam hal ini seberapa besarkah perolehan suara kepala daerah perempuan yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah langsung dan bagaimana kiprahnya selama menjabat khususnya dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat didaerahnya yang diimplementasikan dalam visi dan misi yang mereka buat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan *purposive sampling* berdasarkan tujuan penelitian yakni menggambarkan perolehan suara perempuan yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung di Provinsi Kalimantan Barat dan bagaimana kiprahnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat yang penulis telusuri dari visi dan misi kampanyenya serta kebijakan politik yang diambilnya selama menjabat

Untuk membatasi masalah dan terlalu luasnya jangkauan penelitian dalam jurnal ini maka penulis mengambil sampel hanya pada perolehan suara dan kiprah tiga kepala daerah perempuan di provinsi Kalimantan Barat yang terpilih menjadi kepala daerah baik bupati dan walikota yakni dr. dr. H. Djulianti Djuhardi Alwi, M.Ph, Bupati Sambas periode 2011 -2016, Walikota Singkawang Tjai Tju Me periode 2016- 2021 dan, Bupati Landak Carolin Margret Natasha periode 2017 - 2022.

### **Hak-Hak Perempuan di Bidang Politik**

Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan yang diakui dan dilakukan perlindungan terhadapnya terkait dengan hak-hak perempuan di bidang politik, antara lain;

- 1) Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.
- 2) Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan wakil rakyat di pemerintahan.

- 3) Hak untuk ambil bagian dalam organisasi-organisasi pemerintah dan non-pemerintah dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan kehidupan pemerintah dan politik negara tersebut.
- 4) Hak untuk menentukan taraf kehidupan yang lebih baik dan melatih dirinya dalam menjalankan, menjaga dan membimbing keluarganya.
- 5) Hak dan kewajiban dalam menjalankan perintah Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai hubungan dengan tuhan dan sesama manusia.
- 6) Hak dan kewajiban dalam menjaga dan melindungi dirinya dari pandangan laki-laki, adat, gender, bahwa perempuan tugasnya hanya sebagai kegiatan domestik dan menjaga anak-anaknya.

Demokrasi menjamin setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi secara setara. Perempuan dalam berpolitik juga memiliki hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dapat dipilih dalam pemilihan umum (*right to stand for election*). Perempuan seperti halnya laki-laki dapat menjadi pemenang dalam pemilihan umum<sup>9</sup>

Dasar hukum atas hak-hak perempuan di bidang politik tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum dalam Pasal 21 DUHAM butir 1 dan 2, Pasal 25 ICCPR. Sedangkan dasar hukum yang lebih khusus menyebutkan hak-hak perempuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 7 dan 8 CEDAW, Pasal 1, 2 dan 3 Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat ditemukan dalam Pasal 46 yang berbunyi sebagai berikut : “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami dan mengerti kebutuhan mereka sendiri. Sehingga mereka harus terlibat

---

<sup>9</sup>Kartika, Mudiwati Rahmatudinissa dan Neneng Yani Yuningsih, *Modal Politik Tjai Chui Me Dalam Pemilihan Walikota Singkawang Tahun 2017* (Jurnal Wacana Politik Volume 3 Nomor 2, 2018), hlm..139

<sup>10</sup>Fathurrosi, *Sejarah Perkembangan Politik Perempuan Di Indonesia Analisis Masa Orde Lama-Reformasi dan Perspektif Al-Qur'an*. (Rahema Jurnal Studi Gender dan Anak Volume 5 No.1, 2018), hlm. 16.

dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan publik.<sup>11</sup> Penelitian Craske dalam Izdiha (2017) memberikan konsep baru yakni *political motherhood* atau politik perempuan yang memberikan gambaran mengenai bagaimana perempuan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor seperti tenaga kerja, politik maupun gerakan social.<sup>12</sup> Merujuk konsep *politic of presence* dari Anne Philips (1995) tentang kehadiran perempuan dalam politik didasari oleh prinsip kesetaraan politik yang mengasumsikan setiap orang seharusnya satu, dan tidak satupun yang boleh melebihi yang lain.<sup>13</sup>

Wilayah politik adalah wilayah yang bebas bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat saling bersaing memperebutkan posisi dan jabatan politik. Hal ini berarti tidak ada keistimewaan berkaitan dengan partisipasi politik perempuan oleh karena itu perempuan dan laki-laki diharapkan berkompetisi secara terbuka untuk menempati jabatan-jabatan publik<sup>14</sup>

Politik, hari ini bukan hanya monopoli masyarakat elit yang ada di panggung kekuasaan. Secara geografis, politik pun kini sudah menjadi bagian dari aktivitas yang begitu penting dalam berbagai hal diseluruh pelosok dunia. Tidak peduli mereka yang berada di negara maju, bahkan dinegara tertinggal sekalipun, politik tetap penting. Bahkan masyarakat tradisional yang tinggal jauh dari peradaban dan hiruk pikuk gemerlap kota, kini tidak bisa lepas dari hembusan angin politik.<sup>15</sup>

### **Kiprah dan Suara Perempuan Yang Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Kalimantan Barat**

Berdasarkan data hasil pemilihan bupati dan walikota secara langsung di Provinsi Kalimantan Barat yang mengantarkan seorang perempuan peserta pemilu menjadi kepala daerah perempuan terpilih didapat hasil sebagaimana berikut :

---

<sup>11</sup>Syahid, *Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia* (Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia. Volume 4 No. 1, 2014), hlm.. 34.

<sup>12</sup>Izdiha, "Wajah Politik Perempuan Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta" (Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 7, 2017) Hlm.. 40

<sup>13</sup>Philip, Anne, *The Politic Of Presence. The Political Representation Of Gender Ethnicity And Race* (Oxford: Oxford University Press, 1995) Page. 30.

<sup>14</sup>Marwah, Sofa. "Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Di Jawa Tengah Tahun 2015" (Jurnal Politik Vol. 1 No.2, 2016), hlm.. 268.

<sup>15</sup>Tabroni, *Marketing Politik Media Dan Pencitraan di Era Multipartai* (Bandung : Graha Ilmu, 2014), hlm. 17.

**Tabel 2**  
**Jumlah Perolehan Suara Kepala Daerah Perempuan**  
**Berdasarkan Hasil Pemilihan Bupati/Walikota**  
**Di Kabupaten Sambas, Landak dan Kota Singkawang**

TAHUN PEMILIHAN	2011	2017	2017
NAMA PASANGAN CALON	HJ. Djuliarti Djuhardi Alwi / H. Pabali Musa	Tjai Chui Me H. Irwan, M.Si	Karolin Margret Natasha Herculanus Heriadi
DAERAH PEMILIHAN	Kabupaten Sambas	Kota Singkawang	Kabupaten Landak
JUMLAH SUARA	85.782	38.468	227.531
PERSENTASE SUARA	34,99%	42,60%	98,86%
TOTAL SUARA SYAH	245.163	90.287	237.564
DAFTAR PEMILIH TETAP	401.725	158.753	257.222
PARTISIPASI PEMILIH	61,03	56,87	92,36

Sumber : KPU Kabupaten Sambas, Landak dan Kota Singkawang.

Berdasarkan hasil pemilihan bupati dan walikota di Kabupaten Sambas pada tahun 2011, Kabupaten Landak dan Kota Singkawang pada tahun 2017 diketahui jumlah pemilih yang terdaftar pada pemilihan kepala daerah kabupaten/kota terbanyak pada kabupaten Landak yakni sebanyak 257.222 dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 92,36 persen dengan perolehan suara calon kepala daerah perempuan terbesar diperoleh oleh Karolin Margret Natasha yakni sebesar 98,86 persen pada Pemilihan Bupati Landak Tahun 2017. Sedangkan jumlah pemilih paling kecil yang diikuti calon kepala daerah perempuan terdapat di Kota Singkawang sebesar 158.73 orang pemilih dengan tingkat partisipasi sebesar 56,87 persen.

Di Kabupaten Sambas yang dikenal juga dengan serambi mekahnya<sup>16</sup> juga pernah dipimpin oleh seorang Bupati perempuan yakni Djuliarti Djuhardi Alwi yang memenangkan pemilihan Bupati Sambas pada tahun 2011 dengan 85.742 atau 38,46 persen suara sah dari lima pasang bakal calon bupati yang mengikuti pemilihan Bupati Sambas saat itu. Bahkan Kabupaten Sambas tercatat juga pernah memiliki dua Wakil Bupati Perempuan yakni pada periode 2006 s/d 2011 yang dijabat oleh Djuliarti Djuhardi Alwi yang mendampingi Bupati Sambas pada masa Burhanuddin A Rasyid dan, di periode 2016-2021 Hairiah menjadi Wakil Bupati Sambas

<sup>16</sup>Sambas mendapat julukan serambi mekkah, penamaan ini tidak terlepas dari kekayaan negeri Sambas akan ulama yang bermukim dan menuntut ilmu di Makkah, lihat: Erwin (2008:104).

mendampingi Bupati Sambas Athbah Romin Suhaili yang mengalahkan pasangan *incumbent* Djuliarti Djuhardi Alwi dan Hasanusi.

Tentunya tantangan dan hambatan yang dihadapi kandidat kepala daerah yang dihadapi tidaklah sama sehingga bisa menghantarkan tiga perempuan ini menjadi pemenang pemilihan kepala daerah dalam satu kali putaran didaerahnya masing-masing, Karolin Margret Natasha misalnya berhasil terpilih dalam pemilihan Bupati Landak tahun 2017 karena menjadi calon tunggal.<sup>17</sup>

Faktor dasar yang dapat dianggap mempengaruhi kemunculan pemimpin perempuan di dunia politik adalah budaya patriarkhi, *martyrdom*, pertalian keluarga, gaya hidup, konteks sejarah dan sistem politik.<sup>18</sup>Jika kita melihat sejarah pemimpin perempuan di dunia termasuk Indonesia tidak terlepas dari peran keluarga, atau perempuan yang terjun ke dunia politik dimungkinkan karena memiliki hubungan dan dengan dukungan keluarga yang terjun didunia politik sebelumnya sebut saja pemimpin dunia seperti Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhuto, Perdana Menteri India Indira Ghandi, Pemimpin Myanmar Aung San Su Kyi, Presiden Philipina Gloria Arroyo dan Presiden Indonesia Megawati Soekarno Putri yang berasal dari keluarga politikus atau punya darah politik dari ayah mereka yang pernah menjadi tokoh partai politik dan menjabat Presiden.

Jika menelisik dari asal usul kepala daerah perempuan yang pernah menjabat Bupati dan Walikota di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat didapat fakta bahwa dua bupati perempuan memang berasal dari keluarga politikus atau tokoh masyarakat yang berpengaruh di daerahnya Djuliarti Djuhardi Alwi misalnya Bupati Sambas yang mengawali karier sebagai dokter di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat ini diketahui merupakan putri tokoh masyarakat Kabupaten Sambas H. Djuhardi Alwi Bakran pendiri Organisasi Masyarakat Kijang Berantai mendapat gelar Datok Panglima dari Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Sambas. Bupati Sambas yang lama berkarier di Dinas Kesehatan ini juga merupakan

---

<sup>17</sup>Munculnya pasangan calon tunggal ini berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada September 2015, yang melegalkan pasangan calon tunggal dalam Pilkada. Keputusan tersebut, semula diharapkan menjadi solusi, atas kebuntuan demokrasi.UU No. 10/2016 tentang Pilkada mensyaratkan minimal dua pasangan calon kepala daerah. MK dengan pertimbangan untuk memberi kepastian berjalannya demokrasi, memutuskan pilkada tetap dilaksanakan sekalipun meski hanya dengan calon tunggal (<http://hukumonline.com>.2017)

<sup>18</sup>Astuti ,*Citra Perempuan Dalam Politik*,(Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang. Volume 3 Nomor 1. 2008), hlm. 2.

kader Nahdatul Ulama dan juga pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalimantan Barat.

Karolin Margret Natasha Bupati Landak Periode 2017-2022 diketahui juga berasal dari keluarga Politikus Ayahnya, Cornelis merupakan tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kalimantan Barat pernah menjabat Bupati Landak dan Gubernur Kalimantan Barat dua periode. Perempuan yang pernah menjadi dokter umum PTT di Kabupaten Landak ini memulai karier politiknya dengan menjadi juru kampanye ayahnya saat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Landak dan Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat serta maju dalam pemilihan anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Barat dan berhasil duduk di Kursi DPR selama dua periode yakni periode 2009 -2014 dan 2014-2018 sampai akhirnya maju pada pemilihan Bupati Landak tahun 2017.<sup>19</sup>

Berbeda dari dua bupati perempuan diatas, Walikota Singkawang Tjai Chui Me tidak memiliki berlatar belakang keluarga politikus, sebagai keturunan etnis tionghoa yang beragama Budha, Tjai Chui Me mengawali karier dari profesional swasta yang aktif berorganisasi dibidang sosial,keagamaan dan politik. Organisasi yang digelutinya antara lain Yayasan Tzu Ci, Majelis Tao Indonesia, Perkumpulan Hakka Singkawang dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).<sup>20</sup> Di PDIP lah Tjai Chui Me merintis karier politiknya mulai dari terpilih menjadi anggota DPRD Kota Singkawang periode 2009-2014 dan 2014-2019 hingga terpilih menjadi Walikota Singkawang dalam pemilihan Walikota Singkawang tahun 2017.

Hal yang sama akan ketiga kepala Daerah Perempuan ini adalah ketiganya meraih jabatan politik melalui proses panjang dengan aktivitasnya di partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ditekuninya. Artinya ketiga perempuan terpilih ini telah mempunyai modal politik dan modal sosial sebelum maju di pemilihan kepala daerah. Modal Politik dan modal sosial merupakan sumber kekuasaan yang sangat diperlukan bagi penguasa atau pemimpin politik.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Tribun Landak.com. *Karolin Kalahkan 46 Bupati Se-Kalimantan ! Ini Fakta Tentang Prestasi, Karier dan Profilnya.* (Tribunnews.com, 2017)

<sup>20</sup>La Ode, M.D. *Etnis Cina Indonesia Dalam Politik : Politik Etnis Cina Pontianak Dan Singkawang Di Era Reformasi, 1998-2008.* (Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2012), hlm.. 83

<sup>21</sup>Haboddin, *Memahami Kekuasaan Politik* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 71.

Apakah ketiga kepala daerah perempuan ini bisa terpilih karena didukung oleh suara perempuan dan bagaimana kiprahnya terhadap kesejahteraan masyarakat, penulis kaji dengan membandingkan demografi penduduk di tiga kabupaten pada tahun dimana ketiganya memenangkan pemilihan kepala daerah secara langsung.

**Tabel 3**  
**Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan**  
**Di Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kota Singkawang**  
**Saat Pemilihan Kepala Daerah Yang Dimenangkan Oleh Calon Perempuan**

	Kabupaten Sambas	Kabupaten Landak	Kota Singkawang
	Tahun 2011	Tahun 2017	Tahun 2017
Jumlah Penduduk Pria	311.392	188.942	103.533
Jumlah Penduduk Perempuan	295.846	173.792	101.476
Total Jumlah Penduduk	607.238	362.734	205.009
Persentase Penduduk Perempuan	48,72	47,91	49,50
Persentase Daftar Pemilih Tetap	66,16	70,91	77,44
Dari Jumlah Penduduk			

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kota Singkawang

Berdasarkan data jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada tiga daerah yang dimenangkan oleh Calon Bupati/Walikota perempuan pada saat pemilihan kepala daerah, diketahui ketiga daerah tersebut secara populasi penduduk jumlah penduduk priaanya lebih banyak, dimana persentase penduduk perempuan di Kabupaten Sambas pada tahun 2011 adalah sebesar 48,72 persen, Di Kabupaten Landak pada tahun 2017 sebesar 47,91 persen dan di Kota Singkawang pada tahun 2017 adalah sebesar 49,50 persen.

Jika dilihat perbandingan jumlah penduduk dan daftar pemilih tetap pada tahun pemilihan kepala daerah secara statistik nilai terbanyak adalah pada Kota Singkawang yakni dari jumlah penduduk terdaftar 77,44 persennya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap yakni warga Negara yang memiliki hak pilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.<sup>22</sup>

Jika melihat angka statistik populasi penduduk laki-laki dan perempuan di tiga daerah yang dimenangkan oleh calon kepala daerah perempuan dapat diasumsikan bahwa disamping mendapat limpahan suara pemilih perempuan, calon

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 34 menyatakan Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin.

kepala daerah tersebut juga secara signifikan juga pasti dipilih oleh pemilih pria karena jumlah penduduk pria di tiga daerah tersebut cukup mayoritas, karena jumlah populasi penduduk wanitanya berkisar pada angka 47 persen sampai dengan 49 persen dari populasi. Ini berarti persentase penduduk pria di daerah tersebut di atas angka 50 persen atau mayoritas penduduk pria akan dipimpin oleh seorang kepala daerah perempuan sebagai hasil pemilihan kepala daerah secara langsung.

Untuk mendapatkan simpati dari pemilih tentunya calon kepala daerah perempuan tersebut juga harus memiliki program yang menarik dan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakatnya yang dijabarkan oleh para calon Kepala Daerah tersebut dalam Visi dan Misi sebagaimana berikut :

**Tabel 4**  
**Visi dan Misi Calon Kepala Daerah Perempuan**  
**Yang Berhasil Memenangkan Pilkada**  
**di Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kota Singkawang**

No	Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati /Walikota/Wakil Walikota	Visi / Misi
1	dr. Hj. Djulianti Djuhadi Alwi, M.Ph / Dr. H. Pabali Musa, M.Pd	Terwujudnya Sambas yang Mandiri, Berprestasi , Madani, Serta Sejahtera Melalui Bela Terpikat Sambas
2	dr. Karolin Margret Natasha/ Herculanus Heriyadi, SH	Visi terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju, dan Sejahtera, dengan lima misinya. Kelimanya yakni mewujudkan pelayanan publik dan responsif dan terukur, mewujudkan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan kesejahteraan, mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang maju, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi, dan mewujudkan desa sebagai pusat pembangunan kembali modal sosial.

3	Tjai Chui Me, SE / Irwan, M.Si	<p><b>Visi &amp; Misi Singkawang HEBAT</b></p> <p>Visi :</p> <p>Harmonis Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya  Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri  Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif Dalam Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Adil dan Merata Dalam Pembangunan Infrastruktur, Kesehatan dan Pendidikan Terdepan Dalam Perdagangan, Jasa dan Pengembangan Pariwisata.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan dan memelihara harmonisasi dalam Keberagaman agama, etnis dan budaya;</li> <li>2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi Kerakyatan yang handal, kreatif dan mandiri.</li> <li>3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengendalian potensi sumber daya alam, dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat.</li> <li>4. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas, amanah dan efektif yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>5. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas;</li> <li>6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terarah dan berkesinambungan;</li> <li>7. Mewujudkan Kota Singkawang sebagai kota perdagangan, jasa dan pariwisata.</li> </ol>
---	--------------------------------	--

Sumber: KPU Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kota Singkawang

Sebagai seorang pemimpin publik, pemimpin harus sadar tentang dinamika tantangan organisasi, maka dari itu dibutuhkan kecerdasan emosi guna mengelola kondisi diri dan lingkungan sekitar untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan.<sup>23</sup>Berdasarkan visi dan misi yang dibuat ketiga calon kepala daerah

<sup>23</sup>Rabmi, *Kepemimpinan Kepala Daerah, Studi Kasus Walikota Surabaya Tri Rismaharini Dalam Perspektif Emotional Intelligence*. (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, Volume 3 Nomor 2, 2015) Hlm.. 114

perempuan saat mencalonkan dalam pemilihan bupati dan walikota dengan implementasi program yang mereka laksanakan setelah menjabat menjadi kepala daerah maka didapat hasil sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Implementasi Program Yang Dilaksanakan Kepala Daerah Perempuan Saat Menjabat di Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kota Singkawang**

Nama Kepala Daerah	Implementasi Program Prioritas dan Prestasi
<p>1. dr. Hj. Djulianti Djuhadi Alwi, M.Ph            Bupati Sambas            Periode 2011 -2016</p>	<p>BELA = Bersama LANjutkan</p> <p>TERPIKAT = Tingkatkan Ekonomi Rakyat, Religius, Pendidikan dan kesehatan masyarakat</p> <p>TERIGAS = Tertib dan Terukur, Ekonomi Kerakyatan, Religius, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Good Governance, Amanah Akhlakul Karimah, Social Control dan Social Participation</p> <p>Diwujudkan dengan perbaikan sarana kesehatan masyarakat, posyandu, puskesmas, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pemangkat dan Program kampung KB</p> <p>Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan termasuk peningkatan kompetensi guru-guru disambas dalam bentuk pendidikan dan pelatihan.</p> <p>Revitalasi pasar –pasar tradisional dan peningkatan sarana dan petugas kebersihan di pasar-pasar tradisional</p> <p>Prestasi yang diraih :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabupaten Sambas meraih penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2016</li> <li>- Peningkatan IPM Kabupaten Sambas</li> </ul>
<p>2. dr.Karolin Margret Natasha            Bupati Landak            Periode 2017-2022</p>	<p>Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, perbaikan puskesmas posyandu dan penambahan tenaga dokter dan tenaga kesehatan di tiap kecamatan, program Jambanisasi di tiap desa.</p> <p>Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan pemberian beasiswa kuliah di perguruan tinggi terbaik di pulau jawa bagi anak-anak landak yang berminat menjadi guru</p> <p>Program kegiatan pengembangan sektor pertanian, yang</p>

<p>3. Tjai Chui Me Walikota Singkawang Periode 2017-2022</p>	<p>secara spesifik khusus tanaman padi.</p> <p>Kemudahan berinvestasi dan meningkatkan sinergitas usaha antara pemerintah dan daerah dan credit union.</p> <p>Revitalisasi rumah adat dayak dan peningkatan promosi wisata di Kabupaten Landak</p> <p>Prestasi Yang Diraih :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penghargaan Bupati Terbaik sekalimantan dari Lembaga Administrasi Negara RI tahun 2017</li> <li>- Penghargaan warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yakni warisan budaya tak benda Nyangahatn, warisan budaya tak benda Jonggan dan warisan budaya tak benda Tumpang Negeri</li> <li>- Program Kampung Iklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yakni Desa Simpang Kasturi, Kecamatan Mandor dan Dusun Kuningan, Desa Sempatung, Kecamatan Air Besar.</li> </ul> <p>Pembangunan irigasi untuk petani, drainase, hingga normalisasi sungai.</p> <p>Dalam bidang kesehatan, pelayanan kesehatan seluruh warga tidak mampu dapat terakomodir dalam program layanan kesehatan yang diberi nama Kartu Singkawang Sehat (KSS).</p> <p>Di Bidang Pendidikan pemberian bantuan biaya pendidikan melalui Kartu Singkawang Pintar bagi siswa yang tidak mampu</p> <p>Mempermudah perizinan usaha dan investasi, peningkatan promosi wisata singkawang melalui digitalisasi promosi di semua media dan membuat branding Pasti Ke Singkawang</p> <p>Meresmikan rumah budaya yang menampilkan Singkawang budaya singkawang tempo dulu untuk menarik wisatawan</p> <p>Prestasi Yang Diraih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Tertoleran Di Indonesia Tahun 2018 dari Setara Institute</li> <li>- Media Center Pemerintah Kota Singkawang Menjadi Salah Satu Media Center Terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian Kementerian Komunikasi Informatika</li> </ul>
--	--

Sumber: [Sambas.go.id](http://Sambas.go.id), [landakkab.go.id](http://landakkab.go.id) [Singkawang.go.id](http://Singkawang.go.id) dan Pontianak Post

Berdasarkan data implementasi program prioritas yang dijabarkan dalam visi dan misi pemerintahannya serta prestasi yang di raih ketiga kepala daerah perempuan di Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, dan Kota Singkawang ini, terdapat persamaan program prioritas yakni di sektor pendidikan dan kesehatan.

Bupati Sambas dan Bupati Landak sama –sama memiliki program prioritas peningkatan sarana prasarana dan sumber daya di bidang pendidikan dan kesehatan didaerahnya, kecuali Walikota Singkawang yang mungkin sarana prasana pendidikan dan kesehatannya sudah lebih baik dan maju dari pada Kabupaten Sambas dan Kabupaten Landak Sehingga Walikota Singkawang Tjai Chui Me lebih fokus pada peningkatan jumlah penerima layanan pendidikan dan kesehatan melalui Kartu Singkawang Sehat dan Kartu Singkawang Pintar bagi masyarakat kurang mampu yang sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat.

Ketiga Kepala Daerah perempuan ini juga sama –sama memiliki prestasi yang membanggakan dan telah diakui ditingkat nasional diantaranya Kabupaten Sambas meraih penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2016, Kabupaten Landak meraih Penghargaan Bupati Terbaik sekalimantan dari Lembaga Administrasi Negara RI tahun 2017 dan Kota Singkawang meraih Kota Tertoleran Di Indonesia Tahun 2018 dari Setara Institute.

Dilihat dari latar belakang keluarga kedua bupati perempuan terpilih memiliki latar belakang keluarga yang juga berkecimpung didunia politik selain itu ketiganya juga memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, karena semuanya pernah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi dan sama-sama aktivis organisasi didaerahnya masing-masing. Tentunya keaktifan mereka berorganisasi di masyarakat menjadi bekal ketiganya untuk dikenal masyarakat dan mendapat dukungan dari partai politik sebagai partai pengusung mereka dalam pemilihan kepala daerah.

Emansipasi lahir sebagai ekpresi nyata penuntutan terhadap kebebasan hak-hak perempuan, emansipasi sendiri bukan secara mentah bermakna hak yang sama dengan kaum lelaki, namun arti penting emansipasi adalah bentuk perikeadilan dan

hal tersebut tidak harus sama. Secara sederhana, perempuan menuntut hak yang seimbang sebagaimana pemenuhan hak terhadap kaum lelaki.<sup>24</sup>

Dalam banyak perbincangan publik di era modern ternyata perjuangan persamaan gender yang selama ini didengungkan, secara realitas menunjukkan bahwa peran perempuan dalam perspektif persamaan hak dan kedudukan dengan laki-laki telah sedemikian maju dan berkembang. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kesadaran perempuan itu sendiri mengenai arti pendidikan bagi masa depan umat manusia, khususnya perempuan muslim, dalam menghadapi karir yang setara dengan laki-laki.<sup>25</sup>

Artinya dalam negara yang menganut paham demokrasi tidak masalah pemimpin yang terpilih dalam pemilihan umum harus laki-laki atau perempuan yang penting ia mampu menunjukkan kemampuan *leadershipnya*. Baik aktor –aktor politik maupun masyarakat akan memandang proses-proses dan praktik demokrasi sebagai hal yang *sunatullah*. Atau *the right and natural order of things*.<sup>26</sup> Dari sisi masyarakat, partisipasinya dalam pemilihan kepala daerah langsung mendorong adanya ruang pemberdayaan politik secara signifikan. Tidak saja masyarakat ikut menentukan pemimpin lokal melalui suara pemilih tetapi juga terlibat dalam proses partisipasi politik melalui persetujuannya terhadap program-program calon pemimpin yang disetujuinya dalam bentuk keputusan pilihan suaranya.<sup>27</sup>

Jika dihitung secara kuantitas di Kepala Daerah baik Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang pernah dijabat oleh perempuan di Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat atau jabatan politik tertinggi di level pemerintah Kabupaten/Kota dari total tujuh nama yang menduduki jabatan tersebut 1 orang pernah menduduki dua jabatan yakni Bupati dan Wakil Bupati Sambas, sehingga ada 6 perempuan yang pernah menduduki jabatan tersebut dimana 5 orangnya beragama muslim dan beretnis melayu, 1 orang beragama Katholik beretnis dayak dan 1 orang beragama Budha dan beretnis Keturunan Tionghoa.

---

<sup>24</sup>Syah Putra, *Media dan Politik. Menemukan Relasi Antara Simbiosis Mutualisme Media Dan Politik*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 104.

<sup>25</sup>Abidin, *Kesetaraan Gender dan Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam*. (Jurnal Tarbiyah Volume 2 No. 1, 2015), hlm. 14.

<sup>26</sup>Azra, *Reposisi Hubungan Agama Dan Negara* (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 6.

<sup>27</sup>Suyatno, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia* (Jurnal UNNES Politik Indonesia Volume 2 No.3, 2016), hlm. 216.

**Tabel 6**  
**Asal Etnis dan Agama Kepala dan Wakil Kepala Daerah Perempuan**  
**Yang Pernah Menjabat di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat**

NO	NAMA	Jabatan Politik	Asal Etnis	Agama
1	Rohana Muthalib	Walikota Pontianak	Melayu	Islam
2	dr. Hj. Djuliarti	Bupati Sambas	Melayu	Islam
	Djuhardi Alwi, M.Ph			
3	Thai Tju Me, SE	Walikota Singkawang	Tionghoa	Budha
4	dr. Karolin Margreth Natash	Bupati Landak	Dayak	Katholik
5	Dra. Mahmudah	Pj. Walikota Pontianak	Melayu	Islam
6	dr. Hj. Djuliarti	Wakil Bupati Sambas	Melayu	Islam
	Djuhardi Alwi, M.Ph			
7	Hairiah, SH, MH	Wakil Bupati Sambas	Melayu	Islam

Sumber : data primer (data diolah kembali)

Berdasarkan data asal etnis dan agama kepala dan wakil kepala daerah perempuan yang pernah menjabat di kabupaten/kota di Kalimantan Barat diketahui mayoritas pernah dijabat oleh perempuan beretnis melayu beragama Islam dan sisanya beretnis dayak beragama Katholik dan beretnis Tionghoa beragama Budha. Terlepas darimana asal etnis dan agama mereka, perempuan-perempuan tersebut menunjukkan bukti nyata peran serta emansipasi wanita di Provinsi Kalimantan Barat, karena dengan jerih payah dan dedikasi mereka bisa mendapat kepercayaan penuh masyarakat dan pemerintah untuk menduduki jabatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota memimpin masyarakat yang didominasi penduduk pria serta mendapat perlakuan yang sama di bidang politik, hukum dan pemerintahan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Wakil Bupati/Wakil Walikota yang berhasil dimenangkan calon perempuan yang terpilih menjadi Bupati dan Walikota di Provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak dan Kota Singkawang diketahui jumlah pemilih laki-lakinya lebih besar daripada pemilih perempuan. Artinya perempuan yang memiliki basis suara minoritas dalam pemilihan Kepala Daerah bisa memenangkan

konstentasi pemilihan langsung dengan mendapat dukungan dari suara mayoritas pemilih laki-laki berkat sistem pemilihan langsung terbuka dimana suara terbanyak akan menjadi pemenang pemilihan kepala daerah.

Partisipasi pemilih di Kabupaten Sambas lebih dari 60 persen, sedangkan di Kabupaten Landak sebesar diatas 90 persen dan partisipasi pemilih terendah di Kota Singkawang sebesar 55 persen dari total pemilih terdaftar, para perempuan yang terpilih menjadi Kepala Daerah umumnya punya pengalaman merintis karier di birokrasi dan organisasi politik sebelum maju ke pemilihan Kepala Daerah selain itu sebagian besar juga memiliki darah keturunan keluarga yang aktif berkecimpung didunia politik. Para Kepala Daerah Perempuan juga umumnya memiliki visi dan misi yang sama-sama memprioritaskan peningkatan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan dalam kebijakan politiknya dalam rangka mensejahterakan masyarakat didaerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. (2015). Kesetaraan Gender dan Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyah* 2 (1).
- Adelina, Shelly. (2008). *Perempuan Ayo Berpolitik, Jadilah Pemimpin*. Jakarta: Yayasan Tifa Penerbit Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Astuti (2008). Citra Perempuan Dalam Politik, *Jurnal Studi Gender dan Anak Yin Yang*, 3 (1).
- Azra, Azyumardi. (2002). *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Budiman, Hendra. (2015). *Pilkada Tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Erwin. (2009). *Sejarah Pendidikan Islam Di Sambas*. Pontianak : STAIN Pontianak Press
- Fadlullah. (2011). *Kontribusi Islam Membentuk Watak Kepribadian Bangsa*. Jakarta: Diadit Media Press.
- Fathurrosi. (2018). Sejarah Perkembangan Politik Perempuan Di Indonesia (Analisis Masa Orde Lama-Reformasi dan Perspektif Al-Qur`an), *Rahema Jurnal Studi Gender dan Anak*, 5 (1).
- Fatmawati. (2011). *Harmonisasi Antar Etnik Di Kalimantan Barat*. Pontianak : IAIN Press.

- Gunawijaya, Rahmat. (2017). *Geliat Pembangunan Ekonomi Kota Pontianak Dari Waterfront City Menuju Smart City*. Pontianak: IAIN Press.
- Haboddin, M. (2017). *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang : UB Press
- [Hukumonline.com](https://www.hukumonline.com).(2017). *Begini Dasar Hukum Sengketa Calon Tunggal Pilkada di MK. Aturan yang digunakan dalam hal perselisihan yang terjadi di daerah dengan pasangan calon tunggal yaitu menggunakan PMK No.2 Tahun 2015 yang telah di ubah menjadi PMK No. 2 Tahun 2017*.<https://www.hukumonline.com>
- Izdiha, Anis. (2017). *Wajah Politik Perempuan Studi Etnografi Representasi Suara Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* . *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 4 No. 7, 2017
- Kartika, Ika, Mudiwati Rahmatudinnisa, dan Neneng Yani Yuningsih. (2018). *Modal Politik Tjhai Chui Me Dalam Pemilihan Walikota Singkawang Tahun 2017*, *Jurnal Wacana Politik*, 3 (2).
- La Ode, M.D. (2012). *Etnis Cina Indonesia Dalam Politik : Politik Etnis Cina Pontianak Dan Singkawang Di Era Reformasi, 1998-2008*. Jakarta : Pustaka Obor Indonesia.
- Marwah, Sofa. (2016). *Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Di Jawa Tengah Tahun 2015*, *Jurnal Politik*, 1 (2).
- Mulia, SM. (2007). *Menuju Kemandirian Politik Perempuan*. Jakarta: Kibar Press.
- Novyandri. (2015). *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2).
- Philip, Anne. (1995) *The Politics Of Presence. The Political Representation Of Gender Ethnicity And Race* ( Oxford: Oxford University Press, )
- Rahmi, Purwati Ayu. (2015). *Kepemimpinan Kepala Daerah (Studi Kasus Walikota Surabaya Tri Rismaharini Dalam Perspektif Emotional Intelligence)*, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 3 (2).
- Shihab, Qurais. (1996) *Wawasan Al Quran* .Bandung : Mizan.
- Syahid. (2014). *Peran Politik Perempuan Dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia*. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, 4 (1).
- Syah Putra, Dedi Kurnia (2012). *Media dan Politik. Menemukan Relasi Antara Simbiosis Mutuliasme Media Dan Politik*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suyatno. (2016). *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia*, *Jurnal UNNES Politik Indonesia*, 2 (3).
- Tabroni, Roni. (2014). *Marketing Politik Media Dan Pencitraan Di Era Multipartai*. Bandung : Graha Ilmu
- Tribun Landak.com. (2017). *Karolin Kalahkan 46 Bupati Se-Kalimantan ! Ini Fakta Tentang Prestasi, Karier dan Profilnya*.retrieved from:<https://tribunnews.com>
- Yusuf, Ali Anwar. (2006). *Islam dan Sains Modern*. Jakarta :CV. Pustaka Setia